

## Kades Jangan Takut Gunakan Dana Desa

**SURABAYA** - Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi meminta kepala desa menggunakan anggaran untuk pembangunan desa. Namun, juga berharap, agar dana desa tidak dikorupsi.

Hal itu disampaikan Johan saat menjadi pembicara di acara Diskusi Antikorupsi 'Mengawala Dana hingga ke Desa' bersama Wakil Gubernur Jatim Syaifullah Yusuf, Mendes PDT dan Transmigrasi di gedung negara Graha, Jalan Gubernur Suryo, Jumat (16/10).

"Kalau yang melanggar itu misalnya membangun jalan yang seharusnya butuh Rp 10 juta dibengkakkan menjadi Rp 20 juta, itu nggak boleh, itu korupsi," kata Johan Budi.

Ia mengatakan, jika pengawas dana desa banyak yang dilibatkan, itu lebih baik. Tapi

tidak bisa dijadikan alasan kehati-hatian sehingga tidak menggunakan dana desa. "Jangan karena alasan kehati-hatian dana tidak digunakan. Dana ngendon juga tidak boleh," tuturnya.

Johan menerangkan, 'perselingkuhan' antara eksekutif dan legislatif terjadi di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten kota. Dia berharap, korupsi tidak merembet ke tingkat desa. Apalagi dana yang dikucurkan ke desa pada tahun depan mengalami peningkatan hingga Rp 700 juta. "Jangan sampai merembet ke desa yang masih murni," katanya.

"Penegak hukum juga jangan mencari-cari. KPK saya jamin tidak menyentuh kades, karena nggak punya kewenangan. Tapi jangan korupsi," tegasnya.

Sementara itu, Mendes PDT dan Transmigrasi Marwan Ja'far mengatakan, negara punya kepentingan terhadap dana desa. "Dana desa harus digunakan dengan kehati-hatian, tentu dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi 0,5 persen kalau bisa digunakan," kata Marwan.

Ia menambahkan, soal pelaporan penggunaan dana desa juga tidak berbelit-belit. Hanya cukup 2 lembar pertanggungjawabannya, asal bisa dipertanggungjawabkan dan diperiksa oleh BPK.

"Keberhasilan dana desa untuk mampu menyerap pengangguran, karena ini dimaksudkan untuk padat karya, jangan dikontraktorkan," ujarnya. ■